Analisis Lingkungan Eksternal sebagai Dasar Kebijakan Sektor Perbankan

Muliati, SE., M.Sc.

A. Analisis Perekonomian

1.1. Ekonomi Global 2021 – 2023

Perlambatan ekonomi yang terjadi secara global selama masa pandemi Covid 19 perlahan sudah mulai membaik meskipun masih belum kembali seperti pada masa sebelum pandemi. Kegiatan ekonomi saat ini mulai pulih seiring dengan dibukanya pembatasan kegiatan di negara-negara, peningkatan permintaan barang dan jasa baik di dalam negeri atau luar negeri, dan inflasi yang sudah mulai meningkat di beberapa wilayah merupakan beberapa pertanda yang menunjukkan bahwa perekonomian dunia sudah berada di dalam tahap pemulihan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global terutama pada negara-negara G20 dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara G20

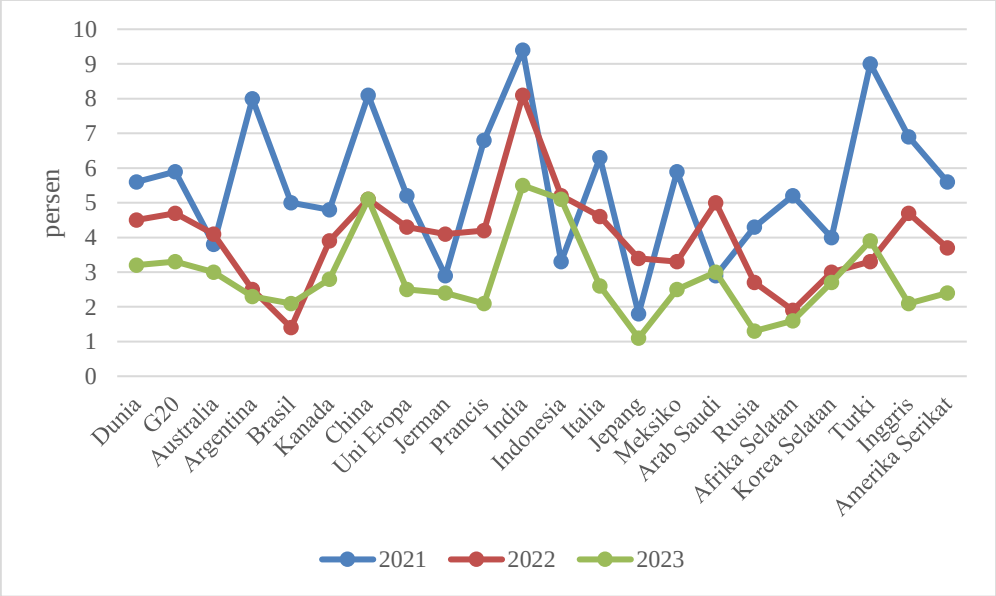

Sumber: International Monetary Fund, 2022

Pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara G20 diperkirakan mengalami kontraksi dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi dengan proyeksi pertumbuhan dunia sebesar 4,5% dan 3,2% pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk negara-negara G20 yang menjadi partner dagang serta tujuan ekspor Indonesia

diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan 4,7% pada tahun 2022 dan 3,2% pada tahun 2023. Proyeksi pertumbuhan tertinggi akan dialami oleh India pada tahun 2022 dan 2023 dengan angka sebesar 8.1% dan 5.5% untuk kedua tahun proyeksi. Demikian pula dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun yang sama, yaitu 5,1. Tingginya angka proyeksi ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di kedua negara dimaksud dapat dikatakan sebagai berita menggembirakan untuk Indonesia karena negara-negara tersebut adalah negara tujuan ekspor untuk salah satu komoditas terbesar Kalimantan Timur yaitu batubara. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi negara Arab Saudi yang pada periode waktu yang sama diproyeksikan meningkat di tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini sedikit banyak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui jalur ekspor terutama untuk produk sektor pertanian dalam arti luas seperti komoditas kelapa sawit, beras, kopi dan karet.

1.2. Pandangan ekonomi Indonesia

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi mengalami pertumbuhan positif sebesar 5.2% dan 5.1% di tahun 2023. Pertumbuhan ini secara umum lebih besar dari proyeksi rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yaitu sebesar 4.5% dan 3.2% untuk tahun yang sama. Pun demikian halnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara G20, di mana pada tahun yang sama proyeksi pertumbuhan adalah 4,7% dan 3,3% untuk tahun yang sama.

Secara historis data pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan cukup baik dan meskipun selama pandemi Covid 19 pertumbuhan ekonomi tercatat negatif namun di kuartal I-III 2021 perekonomian terlihat mengalami perbaikan. Perekonomian Indonesia pada triwulan I/2021 mengalami pertumbuhan yang positif untuk pertama kali sejak adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 1,94 persen (y-to-y). Kinerja positif tersebut dilanjutkan pada pada triwulan II 2021 (5,76 persen) dan dengan perbaikan ekonomi triwulan tersebut, serta ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen lapangan usaha, pada triwulan III/2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,30%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pengeluaran juga menunjukkan perbaikan di beberapa komponen terlepas dari koreksi yang terjadi di tahun 2020. Di

awal pandemi tahun 2019 terdapat beberapa komponen yang mengalami penurunan pertumbuhan antara lain konsumsi pemerintah serta ekspor dan impor barang. Koreksi tertinggi saat itu dialami oleh ekspor barang dengan persentase penurunan sebesar 6,75% sedangkan impor barang turun sebesar 1,54. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya pandemi pada tahun 2020 yang memporak-porandakan perekonomian di seluruh dunia.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2018 – Q3 2021

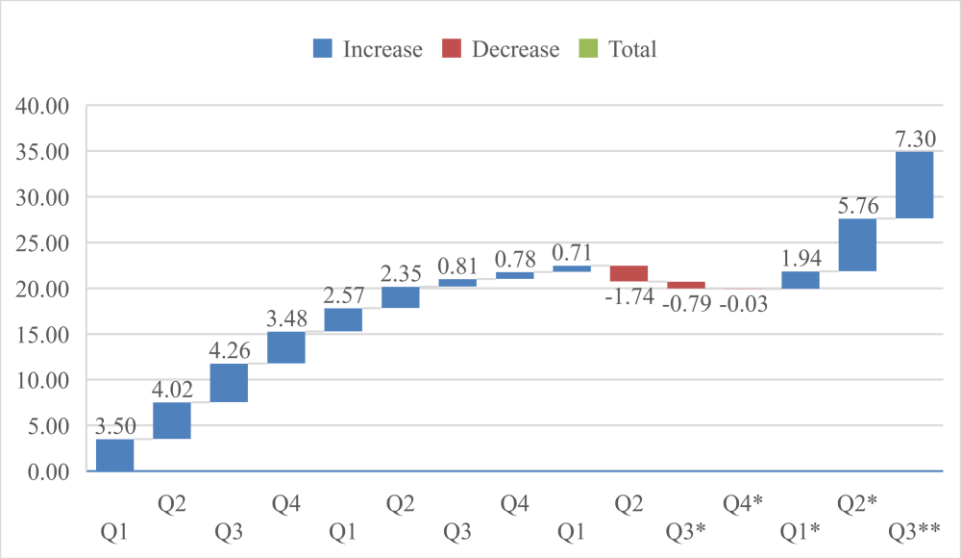

Sumber: Bank Indonesia, 2022
**) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

Di tahun 2020 beberapa komponen pembentuk perekonomian yang mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya antara lain seperti perubahan inventori, namun umumnya pertumbuhan positif komponen-komponen tersebut kurang dari pertumbuhan yang dicatatkan di tahun sebelumnya. Masih di tahun yang sama komponen ekspor barang mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,07% demikian pula dengan impor jasa yang tumbuh sebesar 4,51%. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk komponen impor barang yang berbeda dengan komponen impor jasa justru mengalami koreksi tajam sebesar 3,85%. Penurunan di komponen ekspor dan impor baik barang maupun jasa tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan *lock down* pembatasan kegiatan masyarkat di dalam suatu negara maupun dengan negara-negara lain. Salah satu bentuk *lock down* tersebut adalah menutup

perbatasan/bandara/pelabuhan dan lain sebagainya sehingga lalu lintas barang dan jasa dari dan menuju suatu tempat menjadi terhambat.

Terlepas dari sulitnya keluar dari pertumbuhan negatif dalam dua tahun terakhir di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung menunjukkan pergerakan yang menggembirakan. Hal ini dilihat dari keseluruhan komponen yang mengalami pertumbuhan positif. Dari sembilan komponen pembentuk pertumbuhan terbesar dialami oleh komponen ekspor barang, perubahan inventori, dan impor barang dengan persentase pertumbuhan masing-masing 11,7%, 6,9%, dan 6,35%.

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Komponen Pengeluaran

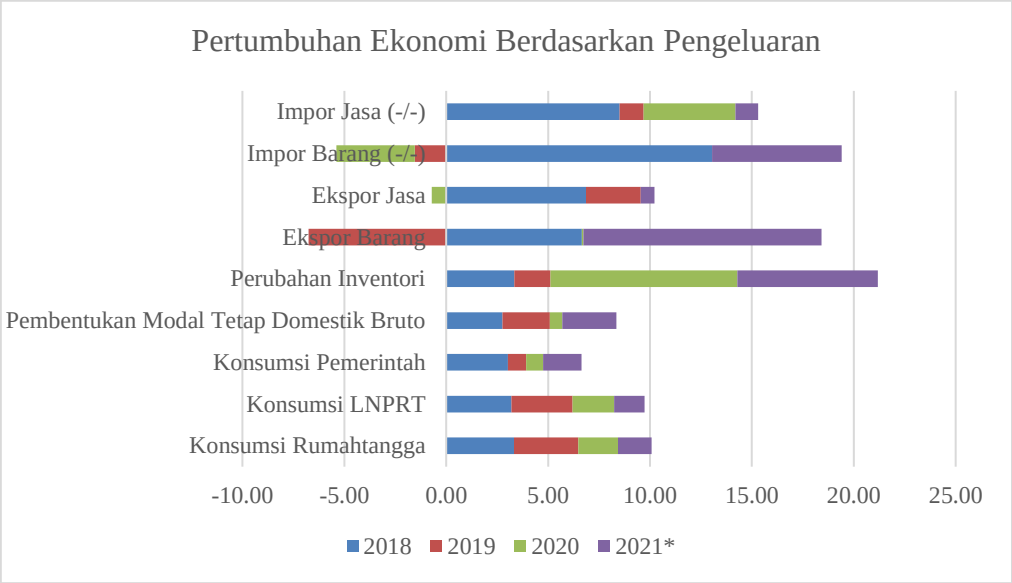

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022
**) angka sementara*

Pertumbuhan ini disebabkan oleh mulai dibukanya kembali bandara/pelabuhan/perbatasan negara dan mulai berangsur normalnya kegiatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia. Peningkatan pertumbuhan pada komponen ekspor dan impor barang merupakan indikasi perbaikan perekonomian pasca pandemi Covid 19, terutama untuk Indonesia.

Di sisi lapangan usaha terdapat 17 sektor yang mencerminkan klasifikasi keseluruhan transaksi di Indonesia, yaitu: A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B) Pertambangan dan Penggalian; C) Industri Pengolahan; D) Pengadaan Listrik, Gas; E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F) Konstruksi; G) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H) Transportasi

dan Pergudangan; I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J) Informasi dan Komunikasi; K) Jasa Keuangan dan Asuransi; L) Real Estat; M,N) Jasa Perusahaan; O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P) Jasa Pendidikan; Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; R,S,T,U) Jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk masing-masing sektor (y-to-y) mengalami peningkatan positif pasca tahun 2020. Pertumbuhan positif terjadi di seluruh sektor kecuali sektor B) Pertambangan dan penggalian; D) Pengadaan listrik dan gas; H) Transportasi dan pergudangan; dan I) Penyediaan akomodasi makan dan minum.

Grafik 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha

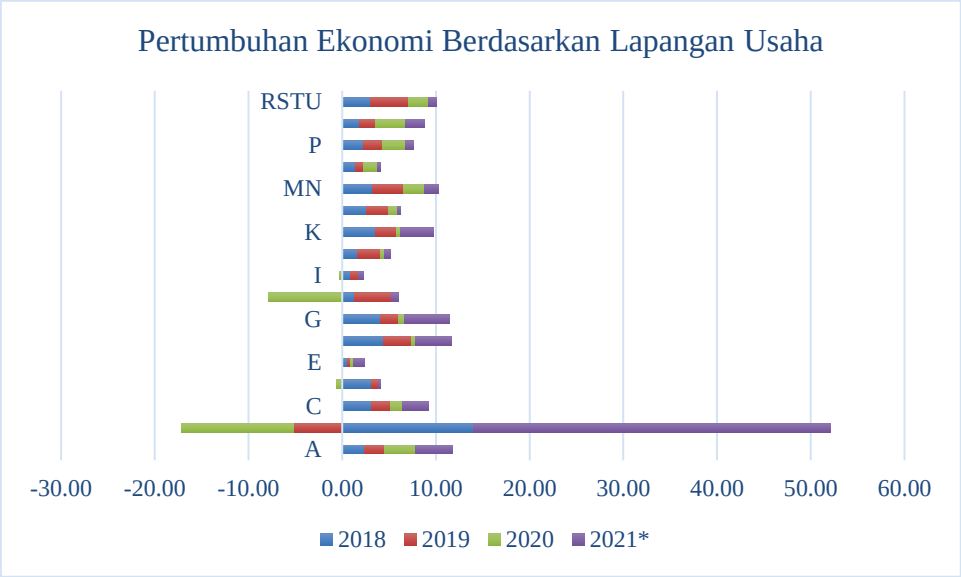

Sumber: Bank Indonesia, 2022
**) angka sementara*

Pertumbuhan negatif yang dialami oleh keempat sektor sebagai akibat dari kebijakan *lock down* seperti yang sudah disampaikan sebelumnya memberikan dampak yang kurang baik terhadap perekonomian di sektor tersebut. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia baik di dalam wilayah administrasi baik dalam maupun luar negeri mengakibatkan aktivitas masyarakat untuk bepergian menjadi sangat rendah. Hal ini berimplikasi pada menurunnya tingkat hunian hotel dan penginapan (akomodasi), sekaligus berimbas pada sektor penyediaan makan dan minum. Demikian pula dengan aktivitas pengiriman barang antar wilayah, baik ekspor atau impor, pun berpengaruh terhadap sektor transportasi. Pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif terbesar dibandingkan dengan sektor-

sektor lain sebagai akibat dari terbatasnya proses pengiriman akibat penutupan sementara bandara/pelabuhan maupun turunnya harga batubara di level dunia.

Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral secara keseluruhan terlihat mengalami perbaikan. Hal ini dapat diketahui dari akumulasi pertumbuhan sektoral per kuartal yang menunjukkan angka positif. Pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada sektor B) Pertambangan dan penggalian dengan rata-rata pertumbuhan dalam tiga kuartal terakhir sebesar 38,1%, diikuti oleh G) Perdagangan besar dan eceran, 4,81%; A) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 3,95%; dan F) Konstruksi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,87%.

1.3. Ekonomi Regional

Di awal tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sampai dengan kuartal III cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kinerja ekonomi nasional. Kinerja ekonomi tersebut mengalami puncak dan membaik menjadi 6,23% dibandingkan angka 0,8% pada kinerja nasional di kuartal yang sama. Namun demikian angka ini mulai menurun drastis pada kuartal IV menjadi 2,82% dan terus bergerak ke bawah menjadi -5,4% pada kuartal II tahun 2020. Penurunan ini juga terjadi di level nasional akibat dari mulai merebaknya pandemi Covid 19.

Grafik 5. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

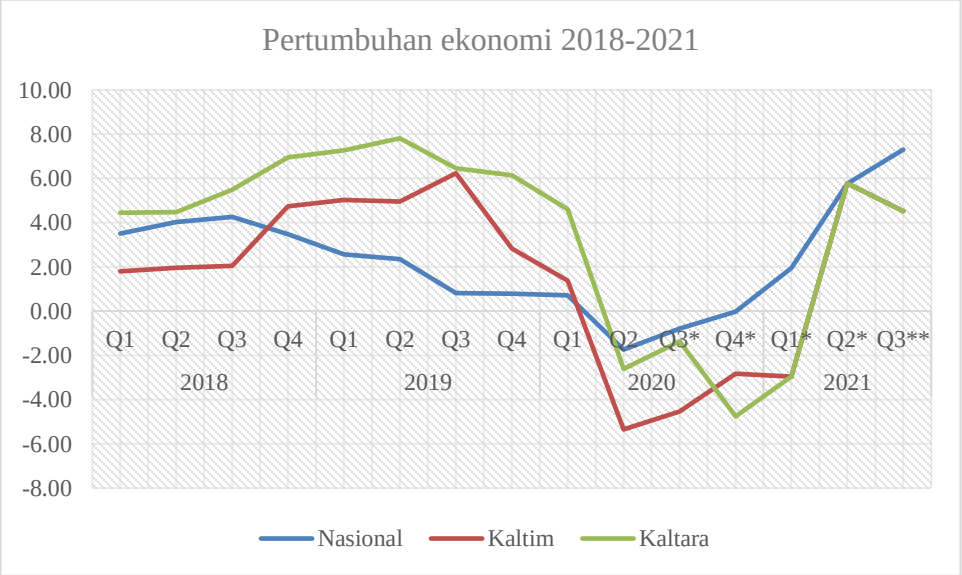

Sumber: BPS, 2021
**) angka sementara*

**) angka sangat sementara*

Memasuki tahun 2021 pada kuartal II kinerja ekonomi Kalimantan Timur mulai bergerak naik dan mencatatkan pertumbuhan positif dengan persentase 5,8%, meningkat drastis dari angka -3,0% pada kuartal I. Di kuartal III pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur masih menunjukkan perbaikan dengan angka sebesar 4,5%. Terdapat tiga dari 17 sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar pada tahun 2020, yaitu sektor Transportasi, Penyediaan akomodasi makan dan minum, dan Pertambangan dengan persentase penurunan masing-masing -5,6%, -5,3% dan -4,6%.

Grafik 5. Distribusi pertumbuhan sektoral PDRB Kalimantan Timur

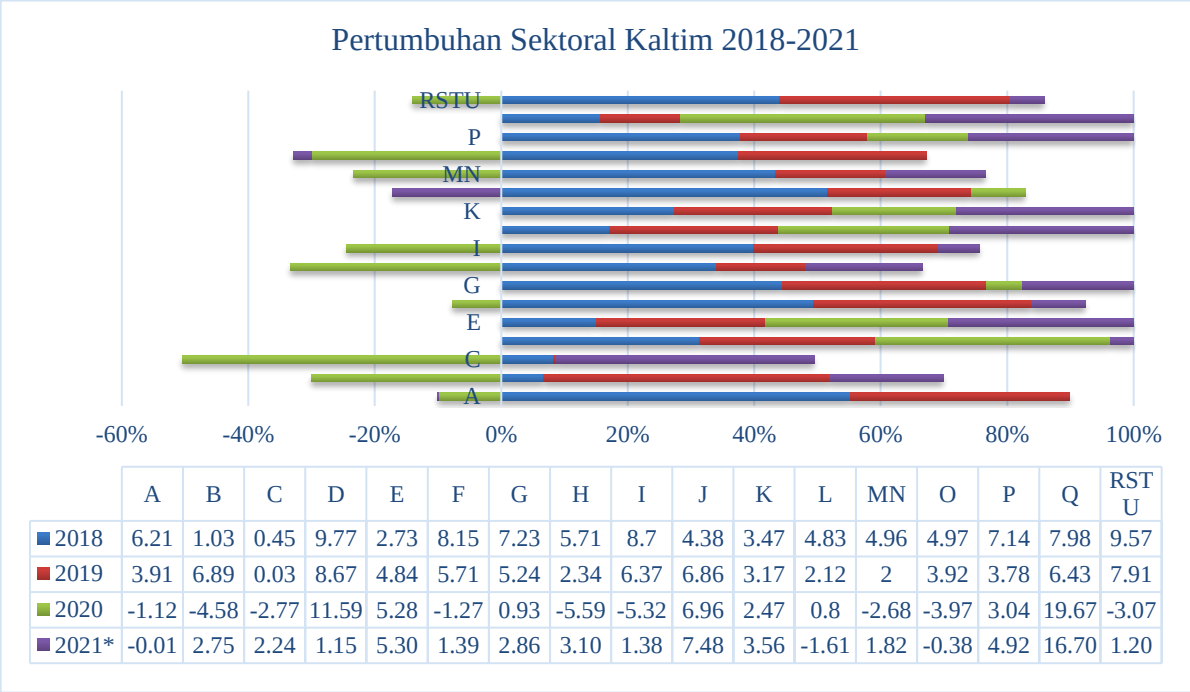

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MN	O	P	Q	RSTU
2018	6.21	1.03	0.45	9.77	2.73	8.15	7.23	5.71	8.7	4.38	3.47	4.83	4.96	4.97	7.14	7.98	9.57
2019	3.91	6.89	0.03	8.67	4.84	5.71	5.24	2.34	6.37	6.86	3.17	2.12	2	3.92	3.78	6.43	7.91
2020	-1.12	-4.58	-2.77	11.59	5.28	-1.27	0.93	-5.59	-5.32	6.96	2.47	0.8	-2.68	-3.97	3.04	19.67	-3.07
2021*	-0.01	2.75	2.24	1.15	5.30	1.39	2.86	3.10	1.38	7.48	3.56	-1.61	1.82	-0.38	4.92	16.70	1.20

Sumber: BPS, 2021
**) angka proyeksi*

Terlepas dari sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif sebagai akibat dari kebijakan pembatasan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di masa itu. Sektor tersebut antara lain adalah Jasa kesehatan, Pengadaan listrik dan gas, Informasi dan komunikasi, dan Pengadaan air, pengelolaan limbah. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Timur terlihat mengalami sedikit perbaikan jika dilihat dari pertumbuhan positif yang dicatatkan oleh sektor-sektor dalam perekonomian. Namun sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun tersebut tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi masih dicatatkan oleh sektor Jasa kesehatan dengan angka sebesar 16,7%, diikuti oleh sektor Informasi dan komunikasi dengan persentase pertumbuhan sebesar 7,5%, dan sektor Pengadaan air, pengelolaan limbah dengan persentase sebesar 5,3%.

Grafik 6. Distribusi pertumbuhan sektoral Kalimantan Utara

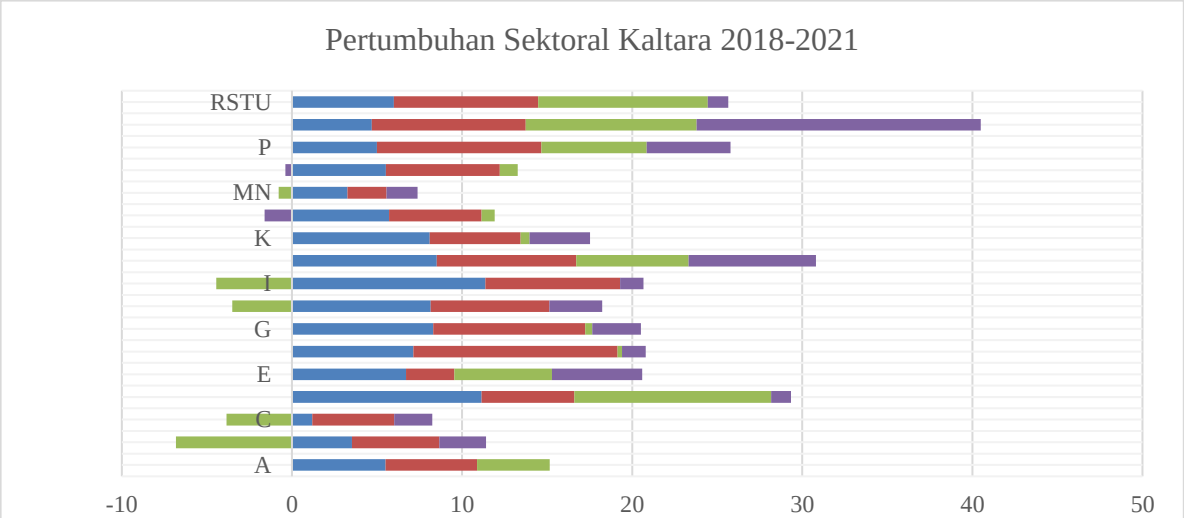

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MN	O	P	Q	RSTU
2018	5.5	3.52	1.19	11.14	6.71	7.14	8.31	8.15	11.38	8.52	8.09	5.71	3.26	5.53	4.99	4.69	5.99
2019	5.38	5.14	4.82	5.47	2.84	12.01	8.93	6.98	7.91	8.2	5.36	5.44	2.3	6.68	9.67	9.05	8.49
2020	4.27	-6.81	-3.85	11.57	5.74	0.25	0.42	-3.51	-4.45	6.6	0.51	0.76	-0.78	1.07	6.2	10.05	9.97
2021*	-0.01	2.75	2.24	1.15	5.30	1.39	2.86	3.10	1.38	7.48	3.56	-1.61	1.82	-0.38	4.92	16.70	1.20

Sumber: BPS, 2021
**) angka proyeksi*

Sama halnya dengan provinsi tetangga, awal tahun 2018 Kalimantan Utara ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami peningkatan sampai dengan kuartal I tahun 2020. Penurunan drastis pertumbuhan ekonomi dimulai pada kuartal II menjadi -2,6% setelah sebelumnya tercatat sebesar 4,6% di kuartal I. Penurunan ini, seperti halnya kinerja ekonomi provinsi lainnya di Indonesia, terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan terhentinya aktivitas

perdagangan dan mobilisasi orang, barang, dan jasa. Pertumbuhan negatif di Kalimantan Utara terus berlangsung sampai dengan kuartal II tahun 2021 dimana berdasarkan laporan sementara BPS persentasenya adalah sebesar 5,7%. Meskipun kembali mengalami sedikit penurunan di kuartal III, angka tersebut diprediksi kembali bergerak naik seiring dengan mulai berangsur normalnya mobilitas ekonomi dan semakin meluasnya persentase penduduk yang sudah diberikan vaksin.

Di sisi sektoral terdapat beberapa sektor ekonomi di Kalimantan Utara yang mengalami pertumbuhan negatif sebagai imbas dari kebijakan pemerintah terkait penangan Covid 19. Di tahun 2020 sektor-sektor dimaksud antara lain sektor Pertambangan sebesar -6,8%, Penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar -4,5%, Industri pengolahan -3,8%, dan sektor Transportasi dan pergudangan yang mengalami penurunan sebesar -3,5%. Terlepas dari sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif, antara lain adalah sektor Pengadaan listrik dan gas 11,6%, Jasa kesehatan 10.1%, dan sektor Jasa lainnya dengan persentase pertumbuhan sebesar 9,9%. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara terlihat mengalami juga sedikit perbaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Sektor pertambangan misalnya, di tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,75% setelah sebelumnya berada di posisi minus. Demikian pula dengan sektor Industri pengolahan, naik menjadi 2,2%, sektor Transportasi dan pergudangan naik sebesar 3,1%, dan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum ±4% dari angka sebelumnya menadi 1,4%. Melihat tren yang terjadi dalam PDRB sektoral ini terlihat optimisme pasar bahwa perekonomian Kalimantan Utara dapat segera kembali normal, terutama setelah angka cakupan vaksin anti Covid 19 sudah semakin meluas.

B. Analisis PESTLE

Penentuan kebijakan suatu perusahaan salah satunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan operasional perusahaan. PESTLE merupakan akronim dari *Politics, Economics, Social, Technology,* dan *Legal Environment.* Analisis PESTLE dapat dilihat pada diagram 1.

Diagram 1. Analisis PESTLE

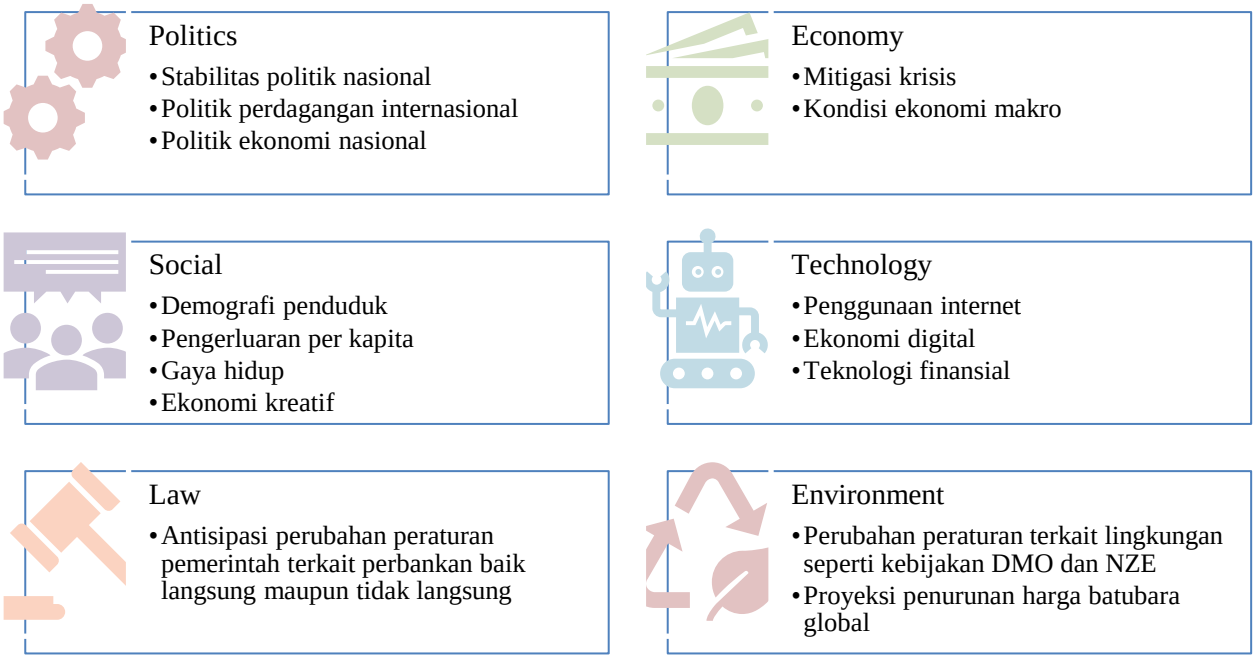

1. Politik
   a. Stabilitas politik nasional

      Stabilitas politik yang terjaga dengan baik akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Semakin meningkat keamanan suatu kawasan akan berimbas pada turunnya tingkat kriminalitas dan gejolak sosial, yang pada akhirnya dapat menarik investor serta menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kedua hal ini berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan kondisi geopolitik baik regional maupu global secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap dunia usia melalui ... pada perekonomian.

   b. Stabilitas politik perdagangan internasional

      Politik perdagangan internasional dan ketidakpastian pasar keuangan dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Saat ini pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan perekonomian kuat seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa dan Jepang masih terdampak akibat pandemi Covid-19, akibatnya terjadi gangguan global baik pada rantai pasokan maupun pada

energi. Namun demikian kinerja sejumlah indikator seperti Purchasing Managers' Index (PMI), penjualan eceran, dan keyakinan konsumen secara umum meningkat pada tahun 2021. Dengan perkembangan tersebut Bank Indonesia dan Kementerian Kuangan sebagai otoritas moneter dan fiskal diperkirakan akan melakukan penyesuaian melalui perubahan kebijakan ekonomi makro nasional.

c. Pergeseran Politik Ekonomi Nasional

Posisi transisi/*New Normal* serta dukungan pemerintah untuk menahan perlambatan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan sentimen positif bagi perkembangan perekonimian terutama perbankan. Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO), responden industri perbankan lebih optimis terhadap kinerja perekonomian dibandingkan kuartal IV di tahun 2020. Tingkat optimisme akan kinerja perekonomian dan perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada tahun 2021 kuartal III adalah 62, sedangkan pada tahun 2020 Indeks Orientasi Bisnis Perbankan berada pada angka 58. Angka indeks ini menunjukkan peningkatan optimisme industri perbankan setelah pada kuartal II tahun 2020 angka IBP tercatat sebesar 42 poin (pesimis).

2. Ekonomi

a. Mitigasi krisis ekonomi untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan menghindari risiko sistemik umumnya diterjemahkan melalui kebijakan makroprudensial, baik yang ditransmisikan dalam kebijakan moneter maupun fiskal. Kebijakan ini akan berdampak pada perubahan kebijakan mikroprudensial sehingga perbankan semestinya melakukan penyesuaian pada target dan strategi bisnis perusahaan. Kebijakan pemerintah terkait makroprudensial yang berimbas pada kebijakan mikroprudensial di industri perbankan saat ini antara lain:

i. *Countercyclical Buffer* (CCB), instrumen yang digunakan untuk memupuk ketahanan modal pada saat ekonomi sedang membaik dan memanfaatkan cadangan modal pada saat ekonomi menurun, sebesar 0%;

ii. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 80% (per 1 September-31 Desember 2021) dan 84% (per 1 Januari 2022);

iii. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) atau yang dikenal dengan sebutan *Macroprudential Liquidity Buffer* (MLB) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%;

b. Penyaluran kredit perbankan diatur oleh otoritas moneter menggunakan instrumen *Loan to Value* atau *Financing to Value* (LTV/FTV). LTV digunakan untuk mencegah penyaluran kredit yang terlalu besar dan terkonsentrasi hanya pada satu sektor yang berisiko tinggi. Tahun 2022 kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti. Peraturan ini berlaku per 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

c. Kebijakan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif, berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

d. Mempertahankan strategi inklusi keuangan melalui instrumen Rasio Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kebijakan makroprudensial. Instrumen ini digunakan untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan pada UMKM, sekaligus meningkatkan layanan keuangan berbasis digital secara nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

e. Memperpanjang masa berlaku kebijakan Kartu Kredit dengan batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan sampai dengan 30 Juni 2022; Penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 30 Juni 2022;

f. Akselerasi implementasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) dalam perdagangan dan investasi dengan negara mitra, dengan memperkuat sinergi bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha.

3. Sosial

a. Demografi penduduk

Jumlah penduduk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperkirakan akan mengalami peningkatan dan tumbuh sebesar 2,13% dan 2,68% dan secara struktur umur masih didominasi penduduk usia produktif dengan persentase 70,28%. Pada tahun 2020 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah memasuki era bonus demografi dengan rasio beban ketergantungan sebesar 43, artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung 43 orang penduduk usia tidak produktif.

b. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita penduduk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu masing-masing sebesar Rp. 12,11 juta dan Rp. 9,07 juta. Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan/daya beli masyarakat dan merupakan refleksi dari penerimaan rumah tangga yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi.

c. Gaya hidup

Pergeseran gaya hidup menjadi masyarakat digital di Indonesia pada umumnya, dan Kalimantan Timur/Kalimantan Utara secara spesifik disebabkan oleh pandemi Covid 19 memberikan hal positif yaitu meluasnya penggunaan internet. Luasnya penggunaan internet juga diimbangi oleh kemampuan literasi masyarakat dalam menerima informasi yang diukur dengan indek literasi digital. Indeks literasi digital Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masing-masing adalah 3,66 dan 3,41 (Kata Data, 2020). Indeks literasi digital berada pada kisaran 0-5 dimana indeks pada angka tersebut termasuk pada kategori sedang. Hal ini berarti masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki dan dapat mengakses internet dengan cukup mudah dan banyak menggunakan internet dengan intensitas yang cukup

tinggi untuk kegiataan sehari-hari. Sebagai informasi indeks literasi digital merupakan indeks komposit yang mengukur kemampuan penduduk dalam mencerna informasi secara online dan terdiri atas empat sub indeks yaitu Indeks informasi dan literasi data; Indeks komunikasi dan kolaborasi, Indeks keamanan; dan Indeks kemampuan teknologi.

d. Ekonomi kreatif

Selain berpengaruh pada perluasan literasi digital, pergerseran gaya hidup juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di Kalimantan Timur terdapat 3 wilayah yang memiliki sebaran pelaku ekonomi kreatif cukup besar yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dengan persentase ekonomi kreatif 47,9% dan 28,4%, disusul oleh Kutai Kartanegara sebesar 9,54%. Sedangkan jika dilihat dari subsektornya ekonomi kreatif tumbuh utamanya pada sub sektor kuliner (20,4%), aplikasi dan game developer (19,8%), dan musik (13,4%). Di Kalimantan Utara daerah yang memiliki sebaran pelaku ekonomi kreatif terbesar adalah Kota Tarakan yaitu 54,8%, disusul oleh Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung dengan persentase masing-masing sebesar 23,8% dan 10,7%. Jika dilihat berdasarkan subsektornya ekonomi kreatif Kalimantan Utara terbesar ada pada subsektor musik, seni pertunjukan dan kuliner dengan persentase berturut-turut 27,4%, 20,2%, dan 19,1%.

4. Teknologi

a. Penggunaan internet

Berdasarkan survei pengguna internet Indonesia naik 8,9% dari 171,2 juta pengguna pada tahun 2018 menjadi 196,7 juta pengguna pada kuartal II tahun 2020. Hal ini membuat potensi Indonesia secara umum meningkatkan nilai ekonomi yang bersumber dari ekonomi digital.

b. Ekonomi digital

Nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2020 tumbuh sebesar 11% dengan nilai ekonomi berbasis internet sebesar Rp. 619 Trilyun, dengan angka proyeksi untuk tahun 2025 sebesar US$ 124 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 23%. Proyeksi nilai ekonomi tersebut berdasarkan transaksi bruto lima sektor yaitu

e-commerce, transportasi online dan pesan antar makanan, media digital, online travel, dan teknologi finansial. Menurut laporan dari Google, Temasek dan Bain kenaikan nilai ekonomi digital pada tahun 2025 akan terjadi pada lima sektor yang melibatkan teknologi finansial, yaitu layanan pembayaran (15%), Remitansi (18%), Asuransi (31%), Pinjaman (32%), dan Investasi (32%).

c. E-commerce

Mulai maraknya penggunaan teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir secara umum berkorelasi dengan semakin meningkatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Survei BPS pada tahun 2020 menyebutkan bahwa persentase media e-commerce yang digunakan oleh pelaku bisnis didominasi oleh pesan instan, media sosial, dan diikuti oleh *platform digital/market place*. Di Kalimantan Timur persentase penggunaan ketiga media tersebut untuk keperluan penjualan masing-masing adalah 93%, 79,7%, dan 11,5%. Sedangkan di Kalimantan Utara persentase masing-masing media berturut-turut adalah 96,2%, 90,5% dan 5,7%. Lebih lanjut, terdapat beberapa metode pembayaran yang umum digunakan yaitu via transfer bank (ATM, *internet banking*, dan *mobile banking*), kartu (debit/kredit/uang elektronik), e-wallet, dan pembayaran tunai. Persentase penggunaan transfer bank dan kartu di Kalimantan Timur masing-masing sebesar 13,46%, 0,27%, dan pembayaran tunai adalah 84%. Di Kalimantan Utara penggunaan metode pembayaran dengan transfer bank hanya sebesar 9,5%, sisanya 90,45% didominasi oleh pembayaran tunai.

5. Legal

Antisipasi perubahan peraturan yang secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak pada industri perbankan antara lain seperti:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 yang merupakan perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dengan diterbitkannya POJK ini,

kebijakan stimulus salah satunya restrukturisasi kredit perbankan diperpanjang menjadi sampai dengan 31 Maret 2022.

b. Pada triwulan IV-2020, OJK menerbitkan dua ketentuan yang secara khusus mengatur perbankan syariah mencakup satu POJK dan satu SEOJK, yaitu:
   1) POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah,
   2) SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Perubahan peraturan perundangan atas bentuk izin usaha di subsektor pertambangan. Kewenangan memberikan izin usaha pertambangan pada undang-undang sebelum revisi terdapat pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, tergantung pada wilayah pengusahaan batubara. Sedangkan berdasarkan peraturan perundangan yang baru otoritas pemberi izin pertambangan hanya ada pada pemerintah pusat kecuali untuk batuan dan bukan logam yang didelegasikan ke pemerintah daerah. Perubahan ini dapat berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia pada umumnya, dan Kalimantan Timur dan Utara secara khusus, terkait dengan investasi baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun asing (PMDN/PMA).

6. Environment

a. Perubahan peraturan perundangan pada bidang lingkungan.

   Peraturan mengenai kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO) di subsektor pertambangan batubara dan komitmen pemerintah untuk mulai menggunakan konsep ekonomi hijau (*net zero emission-NZE)* dapat berpengaruh pada perekonomian di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan.

b. Proyeksi penurunan harga batubara sebagai konsekuensi dari kesepakatan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia seperi India, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2025.